

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang Di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang

Muh Hafizul Hisyam
Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin
Email: MuhHfzlHsym05@gmail.com

Abstract

Community empowerment is one of the essential aspects of improving living standards and promoting socio-economic development in various regions. The Towani Tolotang community possesses significant potential for economic development through community empowerment initiatives, supported by extensive agricultural land and strong local wisdom. However, the implementation of government policies and empowerment programs targeting the Towani Tolotang community remains limited. Therefore, this study aims to examine and analyze the implementation of government policies in empowering the Towani Tolotang community in Amparita Village, Sidenreng Rappang Regency, as well as the factors influencing its implementation. This study employed a qualitative descriptive research method. The research utilized both primary and secondary data sources. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that the implementation of government policies for the empowerment of the Towani Tolotang community in Amparita Village, Sidenreng Rappang Regency, has been carried out through the application of community empowerment principles, namely equality, participation, self-reliance, and sustainability. Overall, the implementation has been relatively successful; however, further improvement is still needed, particularly regarding the sustainability principle in empowering the Towani Tolotang community.

Keywords: *Towani Tolotang; Community Empowerment; Community Empowerment Principles; Amparita Village.*

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan taraf hidup dan pembangunan sosial-ekonomi di berbagai wilayah, pada masyarakat Tolotang terdapat potensi besar dalam upaya peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan Masyarakat. Didukung dengan lahan pertanian yang luas dan kearifan lokal, namun pada pelaksanaan masih kurang kebijakan maupun program pemberdayaan terhadap Masyarakat Tolotang. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari Kesetaraan, partisipatif, kewoodayaan, dan Keberlanjutani, telah berjalan dengan cukup baik akan tetapi masih perlu untuk ditingkatkan terutama pada prinsip keberlanjutan dalam pemberdayaan Masyarakat towani Tolotang.

Kata kunci: *Towani Tolotang, Pemberdayaan Masyarakat, Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Amparita*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan taraf hidup dan pembangunan sosial-ekonomi di berbagai wilayah. UU yang mengatur lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan adalah UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 127 ayat (3) butir b disebutkan bahwa lurah memiliki tugas pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam tataran teknis, LPM diatur Permendagri No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, serta dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Soemantri pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat (Soemantri, 2011:3). Pandangan ini sejalan dengan apa yang dibahas lebih lanjut Subejo dan Narimo (Dalam Mardikanto dan Soebianto, 2012:31) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu

proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.

Pemberdayaan masyarakat selalu dianggap sebagai strategi ampuh dalam menyelesaikan berbagai problematika yang ada seperti: kemiskinan, akses bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, ketimpangan sosial, kelembagaan yang belum berjalan efektif, dan kemandirian masyarakat desa merupakan deskripsi atas persoalan masyarakat di tingkat perdesaan. Namun fakta di lapangan, bahwa pemberdayaan masyarakat belum mampu untuk menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan umum seperti, akses terbatas terhadap keterampilan dan Pendidikan, ketimpangan ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi, serta rendahnya kesadaran terhadap potensi yang dimiliki. Selain itu tantangan sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi proses terjadinya pemberdayaan masyarakat, seperti adanya norma-norma tradisional yang menghambat perubahan sosial dan partisipasi masyarakat terutama pada Masyarakat adat dan desa. Selain berbagai permasalahan tersebut masih ada satu permasalahan yang paling banyak dialami dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu, keberlanjutan (*sustainable*). Pemerintah beranggapan dengan menjalankan semua program pemberdayaan telah sesuai standar dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, tetapi semua upaya tersebut belum memberikan kontribusi yang memadai. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya upaya lanjutan dalam memberdayakan masyarakat, yang menyebabkan program pemberdayaan

tersebut dikatakan gagal dalam mencapai keberhasilan.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Najiaty menurut penulis relevan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dalam prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Najiaty mengemukakan, bahwa untuk mengatasi permasalahan pemberdayaan masyarakat, terdapat empat prinsip yang dapat digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu; prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/ kemandirian, dan keberlanjutan. Menurut penulis, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan Masyarakat Najiaty kita dapat merumuskan solusi yang berkelanjutan dalam meningkatkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Indonesia ialah bangsa yang beragam. Oleh karena itu terdapat berbagai suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman yang dimiliki Indonesia ada karena setiap daerah, suku, dan agama menunjukkan keunikan budayanya masing-masing. Keberadaan masyarakat Towani Tolotang menjadi salah satu bukti keberagaman yang ada di Indonesia. Tolotang merupakan penganut kepercayaan di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidrap. Berdasarkan sejarah bahwa Tolotang bukanlah penduduk asli Amparita, namun asal usul nenek moyang towani Tolotang berasal dari berawal dari kelurahan Wani di Kabupaten Wajo. Historis perpindahan komunitas ini karena Islamisasi di Kerajaan Gowa sekitar pada abad ke-17. Komunitas ini berada di Amparita sebelum Islam masuk di Kerajaan Wajo, sebelum abad ke-16. Secara keseluruhan jumlah penganut kepercayaan sekitar 40 ribu orang termasuk di luar Sulawesi Selatan (Risal, 2002).

Pemberdayaan masyarakat yang merupakan bentuk konkret dalam upaya memperbaiki hidup dan Pembangunan social ekonomi diberbagai wilayah. Di Sulawesi Selatan pada kabupaten sidenreng rapang (sidrap), khususnya pada masyarakat adat Towani Tolotang terdapat upaya nyata yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dilakukan melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Program-program tersebut meliputi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan, serta pengembangan industri kecil dan kerajinan. Diharapkan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat adat Towani Tolotang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, social dan budaya.

Komunitas adat Towani Tolotang yang berada di kabupaten sidrap yang notabennya merupakan daerah Lumbung Pangan Nasional dan sentral konteslasi wilayah penghasil komoditas pangan. Daerah ini menjadikan pertanian sebagai sektor utama pendukung perekonomian masyarakat setempat, hal ini juga didukung oleh Visi Bupati Kabupaten Sidrap yang ingin mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah agrobisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil dan Sejahtera, selain itu daya tarik pariwisata pada kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Towani Tolotang juga dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Sidrap. Dengan fakta tersebut bisa dikatakan bahwa masyarakat adat Towani Tolotang yang berjumlah sekitar 2500 orang di kelurahan Amparita memiliki potensi besar

dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat mendukung dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Towani Tolotang.

Namun seperti banyak wilayah lainnya, masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap juga mengalami berbagai hambatan dalam proses pemberdayaan Masyarakat. Permasalahan- permasalahan yang dihadapi seperti, belum adanya kebijakan secara khusus yang dibuat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi bagi masyarakat Towani Tolotang. Hal ini dibuktikan dalam Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Sidrap tahun 2019-2023, pada Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan selama lima tahun belum tertera secara khusus program pemberdayaan masyarakat mengenai peningkatan ekonomi Towani Tolotang.

Selain hambatan tersebut dalam Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Sidrap tahun 2019-2023, juga menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti, susah akses informasi, infrastruktur yang tidak memadai, minimnya anggaran dalam program pemberdayaan, rendahnya kesadaran terhadap potensi yang dimiliki, serta tidak ada solusi atau tindak lanjut dari pemerintah. Maka dari itu pemberdayaan menjadi penting dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Oleh sebab itu, timbul keinginan penulis untuk menganalisa permasalahan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam judul "Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang". Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana

implementasi kebijakan pemerintah dalam penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap?. Adapun tujuan Penelitian ini yaitu, untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap. Serta faktor-faktor yang mempengaruhinya

METODE PENELITIAN

Tipe dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan dan mengungkapkan data deskriptif sebagai salah satu pendekatan untuk memahami secara umum fenomena, Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini telah melewati dua tahapan yaitu tahapan persiapan (pengurusan administrasi dan keperluan penelitian) serta tahapan pelaksanaan yang meliputi pengumpulan data-data penelitian, analisis data, dan penulisan jurnal. Untuk memperoleh data relevan, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai proses data tersebut diperoleh serta bagaimana mengelolanya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui beberapa teknik pengumpulan data, seperti observasi serta melakukan wawancara terhadap objek yang akan diteliti sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan maupun arsip resmi,

serta literatur yang relevan terhadap dalam melengkapi data primer penelitian.

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam penelitian data kualitatif tersebut pengelolaan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengelolaan data selesai. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang panjang. Data dari hasil wawancara dan kepustakaan yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah hasil catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidreng Rappang, dapat dilihat melalui prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, dengan 4 prinsip yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat tolentang di Kelurahan Amparita yaitu, prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan:

Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan adalah pilar penting dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Amparita, yang terdiri dari dua kelompok utama: masyarakat Muslim dan masyarakat adat Towani Tolotang. Pemerintah setempat, seperti yang diungkapkan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidrap, Bapak AA, dan kepala Kelurahan Amparita, Ibu JM, berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang adil dan inklusif.

Semua program pemberdayaan dirancang untuk memberikan akses yang setara kepada seluruh warga, tanpa diskriminasi. Bukti nyata dari penerapan prinsip ini adalah program menjahit yang diikuti oleh ibu-ibu dari kedua kelompok, serta berbagai kegiatan lain yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidrap, seperti pelatihan teknologi tepat guna, pembinaan lembaga adat, dan pelatihan keterampilan.

Penerapan prinsip kesetaraan ini tercermin dalam data RENSTRA DPM Kabupaten Sidrap Tahun 2019-2023, yang menunjukkan bahwa tidak ada program khusus untuk masyarakat Towani Tolotang atau kelompok lainnya. Program seperti peningkatan pengembangan ekonomi perdesaan, pembinaan dan fasilitasi Bumdes, dan pelatihan keterampilan tersedia bagi semua masyarakat tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Hasilnya, penerapan prinsip kesetaraan ini telah meningkatkan rasa kebersamaan dan saling menghargai antar kelompok masyarakat di Amparita, menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Distribusi sumber daya yang merata dan akses yang setara terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan telah mengurangi potensi konflik dan memperkuat kohesi sosial, menjadikan prinsip kesetaraan sebagai fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Kelurahan Amparita.

Prinsip Partisipatif

Prinsip partisipatif memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Amparita, dengan masyarakat Towani Tolotang menunjukkan keterlibatan yang sangat aktif dalam berbagai program. Partisipasi mereka didorong oleh kebijakan inklusif serta nilai-nilai budaya seperti kebersamaan dan gotong royong. Kepala Kelurahan Amparita, mengapresiasi antusiasme ini, menekankan bahwa

partisipasi aktif dari masyarakat Towani Tolotang dalam kegiatan adat dan program pemberdayaan lainnya menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap kemajuan komunitas. Pernyataan ini diperkuat oleh ketua adat Towani Tolotang, Uwa' WS, yang menyoroti peran penting nilai kebersamaan dan gotong royong dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program serta mempererat hubungan sosial di antara masyarakat.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Towani Tolotang dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan membuat program tersebut lebih efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif ini menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa prinsip partisipatif yang berakar pada nilai-nilai kebudayaan lokal adalah kekuatan pendorong signifikan dalam pemberdayaan komunitas. Sebagai bukti nyata, pada kegiatan adat seperti mappatettong bola, masyarakat, baik Muslim maupun Towani Tolotang, bekerja sama dan saling membantu. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan hasil program tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kelurahan Amparita.

Prinsip Keswadayaan

Prinsip keswadayaan atau kemandirian di Kelurahan Amparita menekankan pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka secara berkelanjutan. Masyarakat Amparita, terutama Towani Tolotang, menunjukkan tingkat

kemandirian yang baik dalam berbagai bidang seperti pertanian dan perdagangan. Dukungan dari pemerintah, seperti penyediaan bibit unggul, pelatihan teknis, dan akses ke pasar, sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Lahan pertanian yang luas, sebesar 288,21 Ha dari total 393,2 Ha, menjadi bukti nyata potensi besar di bidang ini. Selain itu,

keterampilan dan jaringan masyarakat dimanfaatkan untuk mengembangkan UMKM, dengan bantuan pemerintah berupa pelatihan kewirausahaan, akses modal, dan fasilitasi pemasaran di pasar utama Kecamatan Tellu Limpoe.

Nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal juga memainkan peran penting dalam mengembangkan kemandirian masyarakat Amparita. Tradisi seperti kegiatan tahunan parinyameng mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah bekerja sama dengan tokoh adat dan masyarakat lokal untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal melalui berbagai program pelestarian budaya dan festival. Dukungan pemerintah dan semangat kemandirian yang tinggi di kalangan masyarakat menjadikan program pemberdayaan di Amparita lebih efektif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan individu dan memperkuat solidaritas sosial. Prinsip kemandirian yang diterapkan menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, masyarakat dapat mengoptimalkan potensi mereka dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Amparita menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dana dan kurangnya program yang berkelanjutan. Kepala Kelurahan Amparita, JM, mengakui bahwa banyak program yang dimulai dengan antusiasme tinggi namun terhenti karena dana yang tidak mencukupi. Berbeda dengan desa yang memiliki dana desa, Kelurahan Amparita sering kali kekurangan anggaran untuk menjalankan program jangka panjang. Selain itu, jumlah dan variasi program pemberdayaan yang diadakan oleh pemerintah masih kurang, tidak mencakup semua kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat. WD, seorang warga Towani Tolotang, juga menyoroti bahwa banyak

program bagus yang akhirnya terhenti karena dana yang tidak mencukupi dan kurangnya inisiatif yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat.

Kurangnya perencanaan jangka panjang dan keterbatasan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah juga mempengaruhi keberlanjutan program pemberdayaan di Amparita. Banyak program dirancang untuk hasil cepat tanpa mempertimbangkan cara mempertahankan hasil tersebut dalam jangka panjang. Dukungan dari pihak swasta dan lembaga non-pemerintah sangat penting untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat, memungkinkan program untuk terus berjalan dan berkembang. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat membantu mengatasi hambatan ini dan memastikan program-program pemberdayaan di Kelurahan Amparita menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Dukungan tambahan, pelatihan, dan bantuan teknis dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan program-program tersebut, menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Amparita.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan melalui penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang meliputi prinsip kesetaraan, partisipatif, keswadayaan (kemandirian), dan keberlanjutan.

Pada prinsip kesetaraan, pemerintah telah berupaya memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, maupun kelompok sosial. Berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan bersifat

inklusif dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik masyarakat Muslim maupun masyarakat adat Towani Tolotang. Penerapan prinsip ini telah menciptakan hubungan sosial yang harmonis, memperkuat rasa kebersamaan, serta mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Pada prinsip partisipatif, masyarakat Towani Tolotang menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program pemberdayaan menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan menjadi modal sosial yang memperkuat keberhasilan implementasi program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Amparita.

Pada prinsip keswadayaan atau kemandirian, masyarakat Towani Tolotang telah mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan usaha ekonomi masyarakat. Dukungan pemerintah melalui pelatihan, penyediaan sarana produksi, akses permodalan, serta pengembangan keterampilan telah mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Selain itu, pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal turut menjadi faktor penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat.

Namun demikian, pada prinsip keberlanjutan masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan program pemberdayaan belum berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Keterbatasan anggaran, minimnya program jangka panjang, kurangnya kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, serta belum optimalnya perencanaan keberlanjutan

program menjadi tantangan utama yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga terkait untuk menjamin keberlangsungan program pemberdayaan sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Towani Tolotang dan masyarakat Kelurahan Amparita secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dayati, S. (2008). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Penelitian Inovasi*, 29(1), 177-42.
- Anhar, V. Y., Sholikah, S., & Wartono, W. (2020). Tantangan Dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular Di Daerah Semi-Perkotaan: Sebuah Evidence Based Practice Di Padukuhan Samirono, Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas Jambi*, 4(2), 43-49.
- Bahfiarti, T., Chotimah, I., Ilmi, D. N., & Anggriani, A. (2021). Analisis Komunikasi Keluarga Dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Budaya To Lotang Di Kabupaten Sidrap. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 169-180.
- Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41-52.
- Hasse, H. (2010). Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal "Towani Tolotang" Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal Of Government And Politics*, 1(1), 30999
- Margayaningsih, D. I. (2015). Peningkatan Pemberdayaan Dan Kemandirian Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah. *Publiciana*, 8(1), 164-191.
- Mayliza, M., & Adiando, A. (2019). Strategi Pemberdayaan Komunitas
- Terpencil (Kat) Suku Bonai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 41-46.
- Moleong, Lexy J. (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. Di Lahan Gambut.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 6 Ayat (1)
- Ratnadewi, S. (1917). Sistem Kepercayaan Masyarakat Towani Tolotang Antara Tradisi Dan Agama D Buloe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten
- Wajo. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Dan Desa Kabupaten Sidrap Tahun 2019-2023
- Sugiarti, S. (2020). Dinamika Komunitas Hindu Towani Tolotang Di Sulawesi Selatan. *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 4(1), 23-32.
- Sugiarti, S. (2021). Interelasi Hindu Dengan Bugis: Menggali Ajaran Sanatana Dharma Dalam Kepercayaan Tolotang. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 3(2), 131-138.
- Undang-Undang No.23 Tahun 20014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentnag Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004

Dan Program Pembangunan Daerah
(Bappeda).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam
Gbnh Tahun 1999.